

## DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- Daulay, D. Dkk. (2017). *Manajemen*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan.
- Handoko. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manulang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*, Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- M. Situmorang, Viktor&Juhir. (2011). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moelang, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muzwardi, A. (2017). *Free Trade Zone: Menuju Kawasan Ekonomi Khusus Di Batam, Bintan dan Karimun (1 ed.)*. expert.
- Poerwadarminta. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susilawati, Putra Salim dan Yenny. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: *Modern English Press*
- Saiful anwar, sendi-sendi hukum administrasi negara, gelora madani press, medan, 2004
- Soekanto, (2009). *Peran Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT. Tapadang
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.Cv.
- Suhardono, E. (2017). *Teori Peran : Konsep, Dirivasi Dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Yusuf I. (2014). *Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Press.

**Skripsi dan Jurnal:**

- Anggriany, R. D., Kustiawan, K., & Swastiwi, A. W. (2023). Dinamika Perdagangan Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Beacukai Dalam Upaya Penanganan Impor Rokok Ilegal Di Kabupaten Karimun.
- Balkista, S. E. (2022). Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
- Budiman, A. (2021). Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas). *Unes Law Review*, 3(4), 392-405.
- Chikita, K. D., Samin, R., & Kurnianingsih, F. (2020). Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Dalam Mengawasi Peredaran Rokok Non Cukai Di Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 329-336.
- Fi'aunillah, M. H., & Muchtar, M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?. *Info Artha*, 5(2), 118-129.
- Handrisal, Adhayanto O, & Audina A. (2021). Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Of Government*, 6(2), 191–210.
- Irwandi, S. (2018). Implikasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Wilayah Hukum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
- Larissa, D. (2022). Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 243-259.
- Muhammad Ricky, R. Implementasi *Free Trade Zone* (Ftz) Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pada Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Bintan). *Social Sciences*.
- Pradito Sony W. (2018). Implementasi Kebijakan *Free Trade Zone* Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus: Peredaran Rokok Khusus

*Free Trade Zone*). *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(1), 11–26.

Purba, P. S. G. (2022). Peran Bea Cukai dalam Pengawasan Rokok Ilegal yang Masuk dalam *Zona Eksklusif di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

Purba, J. A. (2021). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C.

Radif, M. (2022). Analisis Strategi Badan Pengusahaan Kawasan Bintang Wilayah Tanjungpinang Dalam Pendistribusian Barang Bebas Pajak Di Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2021

Syahputra, I., Danil, E., Adhayanto, O., & Efridadewi, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintang. *Jurnal Selat*, 8(1), 89-107.

Wiharma, C. (2019). Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 759-773.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang

#### **Website :**

Liputan6. 2023. Prevalensi Perokok Indonesia Turun, Ini Datanya. Diunduh pada 23 Maret 2023. Link:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5156467/prevalensi-perokok-indonesia-turun-ini-datanya> (diakses, 23 Maret 2023)

Nurman M. *et.al* 2023. Rokok Ilegal Bebas Beredar di Kepri, Bea Cukai kemana? Diunduh pada 22 Maret 2023. Link: <https://ulasan.co/rokok-ilegal-bebas-beredar-di-kepri-bea-cukai-ke-mana/> (diakses, 22 Maret 2023)

Reski. 2023. Demi Berantas Rokok Ilegal di Kepri LPPI akan beraksi di Kemenkeu. Diunduh pada 23 Maret 2023. Link: <https://jurnalkepri.com/demi-berantas-rokok-ilegal-di-kepri-lppi-akan-beraksi-di-kemenkeu/> (diakses, 23 Maret 2023)

